

## **BAB III**

### **STRATEGI UNISFA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ABYEI**

Pada bab ini menjelaskan tentang Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai internasional menyelesaikan permasalahan perdamaian dunia dan mengirimkan misi perdamaian untuk penyelesaian konflik Abyei antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Akhirnya ditahun 2011, Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk United Interim Security for Abyei (UNISFA) untuk menyelesaikan masalah di wilayah Abyei tersebut. Dalam setiap pertemuan dengan semua Negara Anggota, Sekretaris Jenderal akan memberikan laporan tentang perkembangan dan disetiap pertemuannya PBB memperbarui mandat UNISFA jika memang itu diperlukan dalam menjalankan tugasnya penyelesaian masalah tersebut.

Dalam bab ini juga menjelaskan bagaimana strategi UNISFA sebagai organisasi internasional menjalankan mandatnya dan menyelesaikan konflik wilayah Abyei tersebut. Menurut John Galtung, terdapat 3 tahap penyelesaian konflik yaitu peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Dalam caranya UNISFA melakukan pengamanan kepada warga Abyei dari segala ancaman fisik, kekerasan seksual dan kekerasan pada anak untuk dijadikan sebagai tentara. Dengan membentuk *Safe Demilitarized Border Zone*, UNISFA dapat menjaga keamanan di perbatasan dan menjaga para pengungsi agar tetap aman hingga sampai rumah mereka masing – masing. UNISFA juga menjadi pihak ketiga dalam mediasi antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dalam penentuan hasil akhir status Abyei.

Dari semua mandat yang diberikan PBB untuk UNISFA dalam penyelesaian perebutan wilayah Abyei hingga strategi yang dilakukan UNISFA sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian konflik, dalam bab ini juga menjelaskan hasil dari upaya yang sudah dilakukan oleh PBB dan UNISFA mulai dari gagalnya perjanjian 20 Juni 2011

kembalinya tentara pasukan Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan berada di wilayah Abyei yang meresahkan warga akan terjadinya saling serang antara kedua negara tersebut. UNISFA masih mengupayakan untuk melakukan mediasi kepada Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dalam penentuan status akhir wilayah Abyei.

### **A. Mandat UNISFA**

UNISFA merupakan misi perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memantau dan mengamankan wilayah Abyei dari pemberontakan tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Perserikatan Bangsa Bangsa sangat prihatin dengan situasi di wilayah Abyei semua tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil yang melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia termasuk pembunuhan dan perpindahan sejumlah besar warga sipil. Perserikatan Bangsa Bangsa menegaskan kembali pentingnya implementasi penuh dan mendesak dari *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* oleh Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan.

Hal ini dilakukan dengan memanggil semua pihak yang terlibat untuk menyediakan personil kemanusiaan dengan akses penuh dan tanpa hambatan ke warga sipil yang membutuhkan bantuan dan semua fasilitas yang diperlukan untuk operasi mereka, sesuai dengan kemanusiaan internasional hukum, serta mendesak semua pihak untuk memfasilitasi secara cepat untuk para pengungsi. Memperhatikan maksud dari para pihak untuk membentuk sebuah unit khusus Kepolisian Abyei yang akan menangani isu-isu tertentu yang berkaitan dengan migrasi nomaden<sup>1</sup>. Maka terbentuklah United Nation Interim Security for Abyei (UNISFA) gabungan dari personil kemanusiaan beberapa negara untuk menanggulangi masalah kekerasan warga sipil yang ada di Abyei.

---

<sup>1</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 1990 (2011) Adopted by the Security Council at its 6567th meeting*, 27 Juni 2011. hal 2

PBB menyadari bahwa situasi saat ini di Abyei menuntut respon mendesak dan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional;<sup>2</sup>

1. Memutuskan untuk mendirikan, untuk jangka waktu 6 bulan, Angkatan PBB Interim Keamanan untuk Abyei (UNISFA), dengan mempertimbangkan Perjanjian antara Pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (*Sudan People's Liberation Movement*) Pengaturan Sementara untuk Administrasi dan Keamanan Area Abyei, dan selanjutnya memutuskan bahwa UNISFA terdiri maksimal 4.200 personel militer, 50 personel polisi, dan dukungan sipil yang sesuai;
2. Memutuskan bahwa UNISFA harus memiliki mandat berikut, selain tugas-tugas yang ditetapkan dalam ayat 3:
  - a. Memantau dan memverifikasi pemindahan setiap angkatan bersenjata Sudan, *Sudan Peoples's Liberation Army (SLPA)* atau penggantinya, dari sekitar Abyei seperti yang didefinisikan oleh Pengadilan tetap Arbitrase; selanjutnya, Area Abyei akan demiliterisasi dari setiap kekuatan lain selain UNISFA dan Kepolisian Abyei,
  - b. Berpartisipasi dalam tubuh Abyei Lokasi yang relevan sebagaimana diatur dalam Perjanjian,
  - c. Menyediakan, bekerja sama dengan mitra internasional lainnya di sektor ranjau, bantuan di pertambangan dan saran teknis,
  - d. Memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan gerakan bebas tenaga kemanusiaan dalam koordinasi dengan badan Abyei Lokasi yang relevan seperti yang didefinisikan oleh Perjanjian,

---

<sup>2</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 1990 (2011) Adopted by the Security Council at its 6567th meeting*, 27 Juni 2011. hal 2

- e. Memperkuat kapasitas Kepolisian Abyei dengan memberikan dukungan, termasuk pelatihan personil, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Abyei pada masalah-masalah hukum dan ketertiban,
  - f. Bila perlu dan bekerjasama dengan Kepolisian Abyei, memberikan keamanan bagi infrastruktur minyak di wilayah Abyei;
3. Bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, kewenangan UNISFA sesuai kemampuannya dan daerah penyebaran untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk:
- a. melindungi UNISFA personil, fasilitas, instalasi, dan peralatan,
  - b. melindungi PBB personil, fasilitas, instalasi, dan peralatan,
  - c. menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personil PBB, personil kemanusiaan dan anggota Pengamat Bersama Militer Komite dan Joint Military Observer Tim,
  - d. tanpa mengurangi tanggung jawab dari otoritas terkait, untuk melindungi warga sipil di wilayah Abyei di bawah ancaman kekerasan fisik,
  - e. melindungi Lokasi Abyei dari serangan oleh unsur-unsur yang tidak sah, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian, dan
  - f. menjamin keamanan di wilayah Abyei.<sup>3</sup>

Sekretaris Jendral PBB bertanggung jawab atas terlaksananya mandate UNISFA untuk mendukung tersebut, Sekretaris Jendral memanggil semua negara anggota untuk memastikan pergerakan bebas tanpa hambatan dan cepat keluar dari Abyei dari semua personil, serta peralatan, ketentuan, perlengkapan dan barang – barang lainnya termasuk kendaraan dan suku cadang yang penggunaan untuk menunjang kinerja UNISFA. Sekretaris Jendral memantau kemajuan dan perkembangan dari perjanjian antara Pemerintah Sudan

---

<sup>3</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 1990 (2011) Adopted by the Security Council at its 6567th meeting*, 27 Juni 2011. hal 3-4

dan Sudan Selatan pada tanggal 20 Juni 2011 Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang menyetujui bahwa tidak adanya tentara militer Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan berada dalam kawasan Abyei kecuali tentara militer UNISFA. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pemberontakan dari tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan yang menewaskan banyak warga sipil. Perjanjian 20 Juni juga membahas tentang pembebasan wilayah Abyei dari Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dengan cara perdamaian dan tidak adanya intervensi dari kedua negara tersebut.

### **1. Resolusi 2024 (2011) Dewan Keamanan pertemuan ke 6683, 14 Desember 2011**

Pada tanggal 14 Desember 2011, Perserikatan Bangsa Bangsa melakukan pertemuan membahas dalam hal menyambut perjanjian 29 Juni antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan pada Keamanan Perbatasan dan Mekanisme Bersama Politik dan Keamanan, memperhatikan komitmen dalam ayat 2 untuk menciptakan zona aman demiliterisasi perbatasan (*Safe Demilitarized Border Zone*) dan mengambil catatan lebih lanjut dari permintaan bantuan dari PBB untuk memberikan dukungan eksternal untuk monitoring dan verifikasi di SDBZ itu. Dan dalam menyambut Perjanjian 30 Juli di misi pendukung pemantauan perbatasan antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan, yang menguraikan tentang pembentukan *Joint Border Verification and Monitoring Mechanism* (JBVMM) dengan luas tanggung jawab sesuai dengan SDBZ, dan *Joint Political and Security Mechanism* (JPSM). Menggarisbawahi pentingnya membangun saling percaya, percaya diri dan lingkungan yang mendorong panjang stabilitas dalam pembangunan ekonomi.<sup>4</sup>

Pada pertemuan semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 14 Desember 2011, membahas mengenai kebutuhan mendesak untuk Sudan dan Sudan Selatan untuk

---

<sup>4</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2024(2011) Adopted by the Security Council at its 6683th meeting*, 14 Desember 2011. hal 3

memulai proses normalisasi perbatasan, dan tambahan mandate untuk UNISFA setelah resolusi pada tanggal 27 Juni 2011, yaitu;

Memutuskan bahwa selain tugas-tugas yang ditetapkan dalam ayat 2 dari resolusi 1990, mandat UNISFA harus mencakup tugas-tugas tambahan berikut mendukung JBVMM, tugas-tugas tambahan harus dilakukan oleh UNISFA sesuai kemampuannya resmi dan dalam area operasional diperluas untuk mencakup *Safe Demilitarized Border Zone*, markas JBVMM, markas sektor dan situs tim:<sup>5</sup>

- a. Membantu pihak dalam memastikan ketaatan dalam *Safe Demilitarized Perbatasan Zona* komitmen keamanan disepakati oleh mereka di atas disebutkan 29 Juni dan 30 Perjanjian Juli;
- b. Mendukung kegiatan operasional JBVMM ini, termasuk sektor dan tim, di verifikasi usaha, investigasi, monitoring, arbitrase, penghubung koordinasi, pelaporan, pertukaran informasi, patroli, dan dengan menyediakan keamanan yang sesuai;
- c. Membantu dan menyarankan JBVMM dalam koordinasi keseluruhan perencanaan monitoring dan verifikasi pelaksanaan *Joint Position Paper* di *Perbatasan Keamanan* 30 Mei 2011.
- d. Membantu JBVMM untuk mempertahankan referensi grafik yang diperlukan, geografis dan pemetaan, yang akan digunakan untuk tujuan pemantauan pelaksanaan ayat 2 *Persetujuan Keamanan Perbatasan dan Joint Politik dan Keamanan Mekanisme* 29 Juni 2011;
- e. Memfasilitasi penghubung antara pihak;

---

<sup>5</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2024(2011) Adopted by the Security Council at its 6683th meeting*, 14 Desember 2011. hal 5

- f. Mendukung pihak, bila diminta, dalam mengembangkan mekanisme manajemen bilateral yang efektif di sepanjang perbatasan;
- g. Membantu dalam membangun rasa saling percaya;

Perserikatan Bangsa Bangsa berharap dengan adanya pertemuan ini, Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dapat bekerjasama membantu UNISFA untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Abyei dan SDBZ. Perlengkapan dan alat – alat yang akan dibutuhkan oleh tentara militer UNISFA akan disediakan bersama dengan seluruh negara anggota untuk memaksimalkan tercapainya mandate UNISFA dengan baik.

## **2. Resolusi 2032 (2011), Dewan Keamanan Pertemuan 6699, 22 Desember 2011**

Pada tanggal 22 Desember 2011, Perserikatan Bangsa Bangsa melakukan pertemuan dengan seluruh anggota untuk membahas tentang penyambutan *Abyei Joint Oversight Committee* (AJOC) pada tanggal 13 Desember lalu, yang menegaskan kembali mendesaknya masalah memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada semua masyarakat yang terkena dampak wilayah Abyei. Tentara penggerak Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali ke area Abyei, hal ini menimbulkan keresahan warga Abyei yang takut akan terjadinya pemberontakan antar tentara keduanya dan menewaskan banyak warga sipil. Hal ini melanggar perjanjian tanggal 20 Juni 2011 bahwa tidak adanya militer tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan di wilayah Abyei.<sup>6</sup>

Kembalinya angkatan bersenjata Sudan dan Sudan Selatan di dekat perbatasan bersama mereka dan retorika inflamasi dari kedua belah pihak, yang meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara mereka. Perserikatan Bangsa Bangsa menyadari bahwa situasi saat ini di Abyei dan sepanjang perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Maka Perserikatan Bangsa Bangsa

---

<sup>6</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2032(2011) Adopted by the Security Council at its 6699th meeting*, 22 Desember 2011. hal 2

memutuskan untuk memperpanjang, untuk jangka waktu 5 bulan, mandat dari *United Nation Interim Security for Abyei* (UNISFA) sebagaimana diatur dalam ayat 2 dari Resolusi 1990 (2011) dan dimodifikasi oleh resolusi 2024 (2011), dan bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, tugas-tugas yang ditetapkan dalam ayat 3 resolusi 1990. UNISFA bertugas untuk menyelesaikan permasalahan kembalinya tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan di wilayah Abyei sebelum terjadinya pemberontakan.

Menyambut langkah yang diambil oleh UNISFA terhadap pelaksanaan yang efektif dari mandatnya, termasuk, antara lain, melalui pencegahan konflik, mediasi dan pencegahan,<sup>7</sup>

1. Memutuskan untuk memperpanjang sampai dengan 31 Mei 2014 mandat Pasukan Keamanan Interim PBB untuk Abyei (UNISFA) sebagaimana diatur dalam ayat 2 dari Resolusi 1990 (2011) dan dimodifikasi oleh resolusi 2024 (2011) dan ayat 1 resolusi 2075 (2012), dan bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, lanjut memutuskan untuk memperpanjang sampai dengan 31 Mei 2014 mandat UNISFA sebagaimana diatur dalam ayat 3 resolusi 1990, dan menentukan bahwa untuk tujuan ayat 1 resolusi 2024 (2011), dukungan untuk kegiatan operasional JBVMM.
2. Membawa catatan penyebaran pada bulan Oktober dari kelompok awal 117 tentara diizinkan oleh resolusi 2104 (2013) dan mendesak penyebaran pasukan resmi tersisa sesegera mungkin untuk memungkinkan UNISFA untuk memberikan perlindungan kekuatan yang dibutuhkan untuk JBVMM dan mengaktifkan UNISFA untuk sepenuhnya mendukung JBVMM untuk melakukan operasi diperpanjang ke SDBZ secepat mungkin, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk

---

<sup>7</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2032(2011) Adopted by the Security Council at its 6699th meeting*, 22 Desember 2011. hal 3



menjaga Dewan sepenuhnya diperbarui pada status penyebaran sebagai bagian dari siklus pelaporan yang biasa;

3. Menyambut upaya terus dan efektif untuk sepenuhnya mengoperasionalkan JBVMM, dan menyerukan Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk memanfaatkan tepat waktu dan efektif dari JBVMM, JPSM, dan lainnya setuju mekanisme bersama untuk menjamin keamanan dan transparansi dari SDBZ, termasuk "14 Mile Lokasi";
4. Menyambut juga penciptaan Perbatasan Program Tim Teknis AU (AUBP TT) untuk menentukan secara meyakinkan garis tengah SDBZ di tanah, dan menegaskan kembali bahwa centreline dari SDBZ dalam ada cara prasangka status hukum saat ini atau masa depan perbatasan, yang sedang berlangsung negosiasi pada daerah yang disengketakan dan diklaim, dan demarkasi perbatasan, menyambut lanjut komitmen kedua negara 'untuk menerima temuan AUBP TT;
5. Menggarisbawahi bahwa perlindungan UNISFA untuk warga sipil mandat sebagaimana diatur dalam ayat 3 resolusi 1990 (2011) termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, terlepas dari sumber kekerasan seperti;
6. Menyambut pemindahan militer Sudan dan Sudan Selatan personil militer dan polisi dari wilayah Abyei sesuai dengan resolusi 2046, dan menegaskan kembali tuntutan bahwa Pemerintah Sudan memindahkan Polisi Minyak di Diffra dari Area Abyei segera dan tanpa prasyarat, dan menegaskan lebih lanjut, sesuai dengan resolusi yang relevan, dalam resolusi khususnya tahun 1990 dan resolusi 2046, bahwa di Area Abyei akan demiliterisasi dari setiap angkatan, serta unsur-unsur bersenjata dari masyarakat setempat, selain UNISFA dan Kepolisian Abyei;

7. Mengulangi tuntutananya bahwa Sudan dan Sudan Selatan mendesak memulai pembentukan Wilayah Administrasi Abyei dan Dewan, termasuk dengan memecahkan kebuntuan atas komposisi Dewan, dan merupakan Kepolisian Abyei, untuk memungkinkan untuk mengambil alih fungsi kepolisian di seluruh Area Abyei, termasuk perlindungan infrastruktur minyak, sesuai dengan komitmen mereka dalam Perjanjian 20 Juni 2011,
8. Mendesak Sudan dan Sudan Selatan untuk segera melanjutkan *Abyei Joint Oversight Committee* (AJOC) untuk memastikan kemajuan yang stabil pada pelaksanaan tahun 2011 Perjanjian 20 Juni, termasuk pelaksanaan keputusan AJOC,
9. Mendukung keputusan AJOC ini 3 Mei status Abyei sebagai daerah bebas senjata, menggarisbawahi AU Perdamaian dan perhatian Dewan Keamanan dalam Surat 7 Mei 2013 Komunike atas laporan bahwa berbagai komunitas yang tinggal di Abyei yang bersenjata berat, mengingat bahwa 20 Juni 2011 perjanjian tentang Pengaturan Sementara untuk Administrasi dan Keamanan di area Abyei menetapkan bahwa Abyei harus menjadi daerah bebas senjata dan bahwa hanya UNISFA berwenang untuk membawa senjata di dalam area, dan juga mendesak kedua Pemerintah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Abyei adalah efektif demiliterisasi, termasuk melalui program perlucutan senjata yang diperlukan;
10. Permintaan itu UNISFA, konsisten dengan mandatnya dan sesuai kemampuannya yang ada, mengamati, dokumen dan melaporkan pergerakan senjata ke Abyei dan keberadaan senjata dalam Abyei sebagai bagian dari siklus pelaporan berkala Sekretaris Jenderal;

11. Mendesak kedua Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan di antara masyarakat masing di Abyei Area, termasuk melalui proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput, dan sangat mendesak semua masyarakat Abyei untuk menahan diri maksimum di semua keterlibatan mereka dan untuk berhenti dari tindakan inflamasi atau pernyataan yang dapat menyebabkan bentrokan, atau kegiatan unilateral lebih lanjut;
12. Permintaan UNISFA untuk melanjutkan dialog dengan AJOC dan dengan masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka pada strategi yang efektif dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan penuh oleh semua pihak yang terkait dengan statusnya Abyei sebagai daerah bebas senjata, dengan prioritas tertentu ditempatkan pada penghapusan mendesak senjata berat atau kru-dilayani, serta granat berpeluncur roket, dan mengajak Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, AJOC, dan masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka untuk memperpanjang kerja sama penuh untuk UNISFA dalam hal ini;
13. Mengajak semua pihak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan temuan dan rekomendasi berikut *Abyei Area Joint Investigation and Inquiry Committee's* (AAJIIC) ke dalam pembunuhan seorang peacekeeper UNISFA dan kepala terpenting Ngok Dinka;
14. Menyampaikan niatnya untuk meninjau sesuai amanat UNISFA untuk kemungkinan konfigurasi ulang misi dalam terang kepatuhan Sudan dan Sudan Selatan dengan keputusan yang ditetapkan dalam resolusi 2046 dan komitmen mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian 20 Juni 29 Juni, 30 Juli 2011 dan 27 September 2012, termasuk pemindahan semua kekuatan dari SDBZ, mencapai

kemampuan operasional penuh untuk JVBMM, dan Komite sementara, serta menyelesaikan demiliterisasi penuh Area Abyei;

15. Mencatat ulasan Sekretaris Jenderal konfigurasi UNISFA ini sesuai dengan resolusi 2104, dan penilaian risiko yang relevan dan ancaman, dan kekuatan postur dan pasukan langit-langit diperlukan untuk pelaksanaan mandatnya;
16. Panggilan kepada semua Negara Anggota, di Sudan tertentu dan Sudan Selatan, untuk memastikan pergerakan bebas, tanpa hambatan dan cepat ke dan dari Abyei dan seluruh SDBZ dari semua personel, serta peralatan, ketentuan, perlengkapan dan barang-barang lainnya, termasuk kendaraan, pesawat, dan suku cadang, yang untuk penggunaan eksklusif dan resmi UNISFA;
17. Memperbaharui panggilan pada Sudan dan Sudan Selatan untuk memberikan dukungan penuh kepada PBB, termasuk dengan segera mengeluarkan visa untuk militer, polisi dan personel PBB sipil, termasuk personel kemanusiaan, tanpa mengurangi kewarganegaraan mereka, memfasilitasi mendasarkan pengaturan dan izin penerbangan, dan memberikan dukungan logistik, dan menyerukan semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah Status Perjanjian Pasukan;
18. Mengakui adanya proyek infrastruktur penting yang mempengaruhi UNISFA personel penjaga perdamaian, mencatat tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi ini, dan mendesak Sekretaris Jenderal untuk terus mengambil langkah-langkah yang tersedia baginya untuk memulihkan situasi ini dan lebih memungkinkan UNISFA untuk menerapkannya mandat;
19. Tuntutan bahwa Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan terus memfasilitasi penyebaran PBB Tambang Layanan Action untuk menjamin

kebebasan JBVMM gerakan serta identifikasi dan pembersihan ranjau di wilayah Abyei dan SDBZ;

20. Tuntutan bahwa semua pihak yang terlibat menyediakan personil kemanusiaan dengan penuh, aman dan tanpa hambatan akses ke warga sipil yang membutuhkan bantuan dan semua fasilitas yang diperlukan untuk operasi mereka, sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang berlaku, dan PBB membimbing prinsip-prinsip kemanusiaan bantuan;
21. Meminta Sekretaris Jenderal untuk memastikan bahwa pemantauan hak asasi manusia yang efektif dilakukan, dan hasilnya dimasukkan dalam laporan kepada Dewan, dan menyampaikan kembali seruannya kepada Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk memperpanjang kerja sama penuh mereka untuk Sekretaris Jenderal untuk tujuan ini, termasuk dengan mengeluarkan visa untuk personil PBB yang bersangkutan;
22. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh UNISFA dengan PBB kebijakan toleransi nol pada eksploitasi seksual dan penyalahgunaan dan untuk menjaga Dewan diberitahu jika kasus perilaku tersebut terjadi;
23. Menekankan yang terus kerjasama antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan juga penting untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas dan hubungan masa depan antara mereka;
24. Permintaan Sekretaris Jenderal untuk terus menginformasikan Dewan kemajuan dalam melaksanakan mandat UNISFA dalam interval 90 hari, dan terus membawa ke perhatian segera Dewan pelanggaran serius dari perjanjian tersebut di atas,
25. Catatan Sekretaris Jenderal upaya untuk memastikan kerjasama yang erat antara misi PBB di wilayah tersebut, termasuk UNISFA, Misi PBB di Republik Sudan

Selatan (UNMISS), dan Hybrid Operation Uni Afrika-PBB di Darfur (UNAMID), serta Utusan Khusus untuk Sudan dan Sudan Selatan, dan meminta dia untuk melanjutkan praktek ini;

### **3. Resolusi 2179 (2014) Dewan Keamanan pada pertemuan 7276, 14 Oktober 2014**

Perserikatan Bangsa Bangsa aktif dalam melakukan pertemuan untuk membahas hasil akhir dan keamanan yang ada di Abyei. Pada tanggal 14 Oktober 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa membahas tentang di tundanya membangun lembaga sementara dan menyelesaikan status akhir Abyei untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. PBB mengharapkan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk menahan diri dari setiap tindakan sepihak yang dapat memperburuk hubungan antar komunal dalam area Abyei. Dalam pertemuan ini juga, PBB mengingatkan untuk semua pihak terutama UNISFA yang bertugas untuk menjaga keamanan di area Abyei untuk mengingat pentingnya kerjasama antar negara dalam memberikan bantuan di wilayah tersebut. PBB juga berupaya dalam mendorong semua personel perdamaian dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan penyakit menular. Maka perlunya pemantauan hak asasi manusia yang efektif termasuk dari setiap seksual dan berbasis kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak – anak.<sup>8</sup>

Konflik antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan mendapatkan perhatian internasional dan keprihatinan karena konflik yang terjadi begitu lama hingga saat ini setelah Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011 masih terjadinya konflik perebutan wilayah Abyei. Dalam pertemuannya tanggal 4 Oktober, PBB menegaskan bahwa pentingnya sukarela, aman, pemulangan dan reintegrasi berkelanjutan pengungsi, dan

---

<sup>8</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2179(2014) Adopted by the Security Council at its 7276th meeting*, 14 Oktober 2014. hal 2

siklus migrasi secara damai dan tertib menghormati rute tradisional dari Sudan ke Sudan Selatan melalui Abyei. Hal ini di harapkan UNISFA untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan di Lokasi Abyei sesuai dengan mandatnya. Mengingat resolusi 2117 (2013), yang menjelaskan tentang keprihatinan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di Abyei yang timbul dari perdagangan gelap, mendestabilisasi akumulasi dan penyalahgunaan senjata kecil dan senjata ringan. UNISFA juga harus bekerja lebih keras untuk pembersihan ranjau di sekitaran wilayah Abyei yang dapat mengakibatkan menghambatnya para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing – masing dan migrasi yang aman.

Pada tanggal 6 November 2013, Ngok Dinka melakukan referendum secara sepihak, hal ini dampak dari lanjutan AUPSC. Dan pada tanggal 7 September 2014 Komisi pemilihan umum Sudan untuk menyertakan area Abyei sebagai konstitutuen geografis dalam pemilu 2015 dan hal ini menurut Sekertaris Jendral dapat menimbulkan resiko serius bagi stabilitas Abyei. Dalam laporan 30 Spetember ini, Sekertaris Jendral mengemukakan bahwa situasi politik dan keamanan relative tenang namun dapat dengan mudah meningkat konflik terbuka, hasil dampak dari kemerosotan hubungan bilateral antara Sudan dan Sudan Selatan. PBB menyadari bahwa situasi saat ini di Abyei dan sepanjang perbatasan anatar Sudan dan Sudan Selatan terus merupakan anca,am serius, maka PBB memutuskan untuk;<sup>9</sup>

1. Memutuskan untuk memperpanjang sampai 28 Februari 2015 mandat Pasukan Keamanan Interim PBB untuk Abyei (UNISFA) sebagaimana diatur dalam ayat 2 dari Resolusi 1990 (2011) dan dimodifikasi oleh resolusi 2024 (2011) dan ayat 1 resolusi 2075 (2012 ), dan bertindak di

---

<sup>9</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2179(2014) Adopted by the Security Council at its 7276th meeting*, 14 Oktober 2014. hal 4

bawah Bab VII Piagam PBB, lanjut memutuskan untuk memperpanjang sampai 28 Februari 2015 mandat UNISFA sebagaimana diatur dalam ayat 3 resolusi 1990, dan menentukan bahwa untuk tujuan ayat 1 resolusi 2024 ( 2011), dukungan untuk kegiatan operasional JBVMM meliputi dukungan kepada Komite sementara, yang sesuai ketika diminta oleh keputusan konsensus dari mekanisme ini, dalam wilayah operasional UNISFA dan kemampuan yang ada.

2. Mengambil catatan dari rekomendasi dalam laporan 30 September Sekretaris Jenderal, dan menyambut baik inisiatif UNISFA untuk mendukung dimulainya kembali dialog masyarakat dan administrasi oleh masyarakat di bawah *Abyei Joint Oversight Committee (AJOC)* pengawasan; dalam hal ini, menyerukan kepada masyarakat dan Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju tujuan itu; dan selanjutnya menyambut dukungan saat ini dan masa depan dalam upaya ini dari PBB, Uni Afrika dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia;
3. bahwa Sudan dan Sudan Selatan segera melanjutkan pekerjaan AJOC, dan menyerukan kepada Pemerintah Sudan Selatan untuk nama segera sebuah Wakil dari AJOC untuk memastikan kemajuan yang stabil pada pelaksanaan Perjanjian 20 Juni 2011, termasuk pelaksanaan keputusan AJOC, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk memberikan penilaian kemajuan pada isu-isu ini dalam laporan rutinnya, termasuk rekomendasinya yang dihasilkan dari Mei 2014 Strategis Ulasan UNISFA;
4. Selanjutnya menegaskan kembali tuntutan bahwa Sudan dan Sudan Selatan mendesak memulai pembentukan Wilayah Administrasi Abyei



dan Dewan, termasuk dengan memecahkan kebuntuan atas komposisi Dewan, dan merupakan Abyei Kepolisian, untuk memungkinkan untuk mengambil alih fungsi kepolisian seluruh wilayah Abyei, termasuk perlindungan infrastruktur minyak, sesuai dengan komitmen mereka dalam Perjanjian 20 Juni 2011.

5. Memutuskan mempertahankan pasukan diizinkan oleh resolusi 2104 (2013) sudah dikerahkan, dan bahwa pasukan berwenang tersisa terus dikerahkan konsisten dengan reaktivasi progresif dari JBVMM, untuk memungkinkan UNISFA untuk memberikan perlindungan kekuatan yang dibutuhkan untuk JBVMM dan mengaktifkan UNISFA untuk sepenuhnya mendukung JBVMM untuk melakukan operasi diperpanjang ke SDBZ secepat mungkin, dan meminta Sekretaris Jenderal untuk menjaga Dewan sepenuhnya diperbarui pada status penyebaran sebagai bagian dari siklus pelaporan yang biasa
6. Mengungkapkan kekhawatiran mengenai upaya terhenti untuk sepenuhnya mengoperasikan JBVMM, sebagai akibat dari perselisihan lanjutan Sudan Selatan dengan lokasi garis tengah SDBZ, dan menyerukan kepada Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk memanfaatkan tepat waktu dan efektif dari JBVMM, JPSM, dan mekanisme bersama lainnya setuju untuk menjamin keamanan dan transparansi SDBZ, termasuk "14 Mile Lokasi".
7. Upaya untuk menentukan secara meyakinkan garis tengah SDBZ di tanah, dan menegaskan kembali bahwa garis tengah SDBZ dalam ada cara prasangka status saat ini atau masa depan hukum perbatasan, negosiasi

sedang berlangsung di daerah yang disengketakan dan diklaim, dan demarkasi perbatasan;

8. Menggarisbawahi bahwa perlindungan UNISFA untuk warga sipil mandat sebagaimana diatur dalam ayat 3 resolusi 1990 (2011) termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, terlepas dari sumber kekerasan seperti.
9. Mengirimkan kehadiran tenaga pelayanan keamanan Sudan Selatan dan Diffra unit Polisi Minyak dikerahkan di wilayah Abyei, serta catatan berulang milisi Misseriya ke wilayah tersebut, dan menegaskan kembali tuntutan yang segera dan tanpa prasyarat Pemerintah Sudan Selatan sepenuhnya memindahkan tenaga pelayanan keamanan dari Area Abyei dan bahwa Pemerintah Sudan juga memindahkan Polisi Minyak di Diffra dari Area Abyei, dan menegaskan kembali lanjut, sesuai dengan resolusi yang relevan, dalam resolusi khususnya tahun 1990 dan resolusi 2046, bahwa di Area Abyei akan demiliterisasi dari setiap angkatan, serta unsur-unsur bersenjata dari masyarakat setempat, selain UNISFA dan Kepolisian Abyei sesuai dengan keputusan 3 Mei 2013.
10. Supportsthe AJOC ini status Abyei sebagai daerah bebas senjata, menggarisbawahi kekhawatiran AUPSC dalam nya 7 Mei 2013 Komunike atas laporan bahwa berbagai komunitas yang tinggal di Abyei yang bersenjata berat, mengingat bahwa 20 Juni 2011 Perjanjian Pengaturan Temporary untuk Administrasi dan Keamanan di area Abyei menetapkan bahwa Abyei harus menjadi daerah bebas senjata dan bahwa hanya UNISFA berwenang untuk membawa senjata di dalam area, dan dalam hal ini, mendesak kedua pemerintah untuk mengambil semua

langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Abyei secara efektif demiliterisasi, termasuk melalui program perlucutan senjata yang diperlukan;

11. UNISFA untuk konsisten dengan mandatnya dan sesuai kemampuannya yang ada, mengamati, dokumen dan melaporkan pergerakan senjata ke Abyei dan keberadaan senjata dalam Abyei sebagai bagian dari siklus pelaporan berkala Sekretaris Jenderal.
12. Mendesak kedua Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan di antara masyarakat masing di Abyei Area, termasuk melalui proses rekonsiliasi di tingkat akar rumput dan mendukung UNISFA di mengadakan konferensi perdamaian antara Ngok Dinka dan Misseriya kepala tradisional, dan sangat mendesak semua masyarakat Abyei untuk menahan diri maksimum di semua keterlibatan mereka dan untuk berhenti dari tindakan inflamasi atau pernyataan yang dapat menyebabkan bentrokan, atau kegiatan unilateral lebih lanjut;
13. UNISFA untuk melanjutkan dialognya dengan AJOC dan dengan masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka pada strategi yang efektif dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan penuh oleh semua pihak yang terkait dengan statusnya Abyei sebagai daerah bebas senjata, dengan prioritas tertentu ditempatkan pada mendesak penghapusan senjata berat atau kru-dilayani, serta granat berpeluncur roket, dan mengajak Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, AJOC, dan masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka untuk memperpanjang kerja sama penuh untuk UNISFA dalam hal ini;

14. Mengajak semua pihak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan temuan dan rekomendasi berikut *the Abyei Area Joint Investigation and Inquiry Committee's* (AAJIIC) ke dalam pembunuhan seorang peacekeeper UNISFA dan kepala terpenting Ngok Dinka;
15. Expressesits niat untuk meninjau sesuai amanat UNISFA untuk kemungkinan konfigurasi ulang misi dalam terang kepatuhan Sudan dan Sudan Selatan dengan keputusan yang ditetapkan dalam resolusi 2046 dan komitmen mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian 20 Juni 29 Juni, 30 Juli 2011 dan 27 September 2012, termasuk pemindahan semua kekuatan dari SDBZ, mencapai kemampuan operasional penuh untuk JVBMM, dan Komite Ad Hoc, serta menyelesaikan demiliterisasi penuh Area Abyei;
16. Calls kepada semua Negara Anggota, di Sudan tertentu dan Sudan Selatan, untuk memastikan pergerakan bebas, tanpa hambatan dan cepat ke dan dari Abyei dan seluruh SDBZ dari semua personil, serta peralatan, ketentuan, perlengkapan dan barang-barang lainnya, termasuk kendaraan , pesawat, dan suku cadang, yang untuk penggunaan eksklusif dan resmi UNISFA;
17. Memperbaharui seruannya kepada Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk memberikan dukungan penuh kepada PBB, termasuk dengan segera mengeluarkan visa untuk militer, polisi dan personil PBB sipil, termasuk personil kemanusiaan, tanpa mengurangi kewarganegaraan mereka, memfasilitasi pengaturan mendasarkan dan izin penerbangan, dan memberikan dukungan logistik, dan mengajak semua pihak untuk

sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah Status Perjanjian Pasukan;

18. Menyetujui adanya proyek infrastruktur penting yang mempengaruhi UNISFA personel penjaga perdamaian, mencatat tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi ini, dan mendesak Sekretaris Jenderal untuk terus mengambil langkah-langkah yang tersedia baginya untuk memulihkan situasi ini dan lebih memungkinkan UNISFA untuk melaksanakan mandatnya ;
19. Demands bahwa Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan terus memfasilitasi penyebaran PBB Tambang Layanan Action untuk menjamin kebebasan JBVMM gerakan serta identifikasi dan pembersihan ranjau di wilayah Abyei dan SDBZ;
20. tuntutan lebih lanjut bahwa semua pihak yang terlibat menyediakan personil kemanusiaan dengan penuh, aman dan tanpa hambatan akses ke warga sipil yang membutuhkan bantuan dan semua fasilitas yang diperlukan untuk operasi mereka, sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang berlaku, dan PBB prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan; Sekretaris Jenderal
21. Usulan untuk memastikan bahwa pemantauan hak asasi manusia yang efektif dilakukan, dan hasilnya dimasukkan dalam laporan kepada Dewan, dan menyampaikan kembali seruannya kepada Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk memperpanjang kerja sama penuh mereka ke Sekretaris Jenderal untuk tujuan ini, termasuk dengan mengeluarkan visa untuk personil PBB yang bersangkutan;

22. Usulan Sekretaris Jenderal untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh UNISFA dengan PBB kebijakan toleransi nol pada eksploitasi seksual dan penyalahgunaan dan untuk menjaga Dewan diberitahu jika kasus perilaku tersebut terjadi;
23. Menekankan yang terus kerjasama antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan juga penting untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas dan hubungan masa depan antara mereka;
24. Usulan dari Sekretaris Jenderal, dengan dukungan dari Komisi Uni Afrika dan Pemerintah Demokratik Federal Ethiopia, untuk mengeksplorasi pilihan dalam konteks 12 September 2014 AUPSC Komunike yang mendesak Pihak menggunakan ketentuan kreatif berdasarkan saling pengertian untuk mempercepat pelaksanaan dari unsur-unsur administrasi dan keamanan yang luar biasa dari Perjanjian pada Juni 2011, sesuai, dan untuk memasukkan temuan mereka dalam rekomendasi konsolidasi dari UNISFA yang akan disampaikan kepada Dewan keamanan dalam laporan berikutnya dari Sekretaris Jenderal;
25. Requeststhe Sekretaris Jenderal untuk terus menginformasikan Dewan kemajuan dalam melaksanakan mandat UNISFA dalam dua laporan tertulis, selambat-lambatnya 1December 2014 dan 2 Februari 2015 masing-masing, dan terus membawa ke perhatian segera Dewan pelanggaran serius atas direferensikan perjanjian;
26. Notesthe Sekretaris Jenderal upaya untuk memastikan kerjasama yang erat antara misi PBB di wilayah tersebut, termasuk UNISFA, Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS), dan Uni Afrika-PBB Hybrid

Operation in Darfur (UNAMID) , serta Utusan Khusus untuk Sudan dan Sudan Selatan, dan meminta dia untuk melanjutkan praktek ini;

## **B. Strategi Penyelesaian Konflik di Abyei**

Konflik internal antar negara dapat disebabkan oleh konflik yang dilator belakang banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, militer, perbatasan dan sebagainya. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan untuk penyelesaian, konflik terkadang dapat diselesaikan oleh kedua pihak yang bertikai secara langsung. Akan tetapi, ada beberapa masalah yang harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik itu oleh negara atau sebagai Organisasi Internasional. Dan penyelesaian konflik menurut John Galtung ada tiga tahap yaitu, *Peacekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding*. Dalam masalah konflik perebutan wilayah Abyei antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, melibatkan organisasi internasional UNISFA dibawah naungan dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menjadi pihak ketiga atau pihak penengah antara kedua belah pihak. Sebagai pembawa misi perdamaian di Sudan, UNISFA menjalankan mandatnya dan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik di wilayah Abyei tersebut.

### **1. Perlindungan warga sipil dan Fasilitas Keamanan**

Menurut teori penyelesaian konflik suatu negara menurut John Galtung bahwa mempunyai 3 tahap, dan perlindungan warga serta memberikan fasilitas keamanan itu sebagai bentuk penyelesaian konflik *Peacekeeping*. Dimana proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran penjaga perdamaian yang netral. Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa Bangsa menegaskan kembali resolusi sebelumnya 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006) 1738 (2006) dan 1894 (2009) tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) , dan 2068 (2012) pada anak-anak dan konflik bersenjata, 1502 (2003) tentang

perlindungan tenaga kemanusiaan dan PBB, dan 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), dan 1889 (2009) dan 1960 (2010) tentang perdamaian dan keamanan perempuan. Mengingat komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan dalam Perjanjian 20 Juni 2011 antara Pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (*Sudan People's Liberation Movement*) pada Pengaturan untuk Administrasi dan Keamanan Wilayah Abyei. Dan pada tanggal 29 Juni 2011 Persetujuan antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan pada keamanan perbatasan dan mekanisme bersama politik dan keamanan, dan pada tanggal 30 Juli 2011 ditandatanganinya perjanjian dukungan pengawasan perbatasan misi antara Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan, serta pada tanggal 27 September 2012 Perjanjian pengaturan kerjasama dan keamanan. Keputusan pada tanggal 8 Maret, Gabungan politik dan keamanan mekanisme ini, dan implementasi matriks dilakukan mulai dari tanggal 12 Maret 2013, mencapai kesepakatan oleh Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan di Addis Ababa di bawah naungan *AU High level Implementation Panel (AUHIP)*.<sup>10</sup>

UNISFA dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa memutuskan untuk melakukan upaya oleh Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk demiliterisasi *Safe Demilitarized Border Zone* termasuk "14 Mile Area," dan untuk melaksanakan *the Joint Border Verification and Monitoring Mechanism (JBVMM)* sesuai dengan resolusi Dewan 2046 dan AU Dewan Perdamaian dan Keamanan Roadmap 24 April 2012, menggarisbawahi pentingnya membangun dan mempertahankan pemantauan JBVMM efektif Zona Perbatasan aman demiliterisasi termasuk "14 Mile Area,"<sup>11</sup>. Dalam resolusi 2104 (2013) mengerahkan semua pasukan yang tersisa berwenang untuk terus dikerahkan dengan reaktivasi progresif

---

<sup>10</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2104 (2013) Adopted by the Security Council at its 6970th meeting*, pada tanggal 29 Mei 2013. hal 1

<sup>11</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2104 (2013) Adopted by the Security Council at its 6970th meeting*, pada tanggal 29 Mei 2013. hal 2



dari JBVMM, memungkinkan UNISFA untuk melakukan perlindungan kekuatan yang dibutuhkan JBVMM melakukan operasi di sepanjang *Safe Demilitarized Border Zone*.

Mengingat pentingnya koherensi bantuan PBB di wilayah tersebut, serta upaya menyambut dan mendorong PBB untuk menyadarkan personel penjaga perdamaian dalam pencegahan dan pengendalian HIV / AIDS dan penyakit menular lainnya dalam semua operasi penjaga perdamaian. PBB menekankan perlunya pemantauan hak asasi manusia yang efektif, termasuk dari setiap kekerasan seksual dan berbasis gender dan pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak, mengambil catatan bahwa telah ada perkembangan berkaitan dengan operasionalisasi pemantauan hak asasi manusia di wilayah Abyei, dan mengulangi keprihatinannya pada kurangnya kerjasama dengan pihak dengan Sekretaris Jenderal untuk tujuan ini. Daruratnya memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada semua masyarakat yang terkena dampak di wilayah Abyei dan menegaskan pentingnya sukarela, aman, pemulangan dan reintegrasi berkelanjutan pengungsi, dan siklus migrasi damai dan tertib menghormati rute migrasi tradisional dari Sudan ke Sudan Selatan melalui Abyei, dan mendesak UNISFA untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan di Lokasi Abyei sesuai dengan mandatnya. Dampak merusak dari proliferasi senjata, pada keamanan warga sipil, PBB juga prihatin dengan ancaman sisa ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang di wilayah Abyei yang menghalangi kembalinya aman pengungsi ke rumah mereka dan migrasi yang aman. Hal ini masih menjadi agenda besar dari UNISFA dalam menjalankan mandatnya untuk memfasilitasi para pengungsi memberikan keamanan untuk migrasi dengan aman.

Di tahun 2011, Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan melanggar Perjanjian 20 Juni 2011 yang menyatakan bahwa terbebasnya wilayah Abyei dari semua pasukan pergerakan pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk menghindari pemberontakan antar komunal di wilayah Abyei. Tentara pergerakan pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali beroperasi

di wilayah Abyei sehingga meresahkan warga dan Sekertaris Jendral karena akan mengganggu stabilitas perdamaian dan menghambat kinerja UNISFA dalam menjalankan mandatnya. Pada akhirnya, Sekertaris Jendral, mendesak Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk mencabut tentara pergerakan mereka dari wilayah Abyei sebelum terjadinya konfrontasi dari beberapa komunal. Sekertaris Jendral menugaskan UNISFA untuk tetap berjaga di sekitaran Abyei jika nanti terjadinya pemberontakan antar tentara kedua negara tersebut, UNISFA dapat melakukan aksi fisik jika hal tersebut menjadi ancaman keselamatan warga perbatasan Abyei. Sesuai dalam mandate UNISFA yang diatur dalam ayat 3 resolusi 1990 (2011) yang berisikan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, terlepas dari sumber kekerasan tersebut.

## **2. Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase**

John Galtung mengemukakan dalam teori penyelesaian konflik ada 3 tahap dan Negoisasi, mediasi serta arbitrase merupakan tahap penyelesaian dalam bentuk Peacemaking dimana proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak bertikai melalui mediasi, negoisasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Hal ini dikaitkan kepada pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dan sebagai pihak netral yang tidak memihak dari kedua negara yang bertikai, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak yang terkait yang sedang berunding.<sup>12</sup>

PBB dalam mengekspresikan dukungan penuh untuk upaya Uni Afrika pada situasi antara Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan, untuk meredakan ketegangan saat ini,

---

<sup>12</sup> Hermawan, Yulius. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional; aktor, isu dan metodologi*. Graha ilmu. Yogyakarta. 2007. hal. 93

memfasilitasi dimulainya kembali negosiasi hubungan pasca-pemisahan dan normalisasi hubungan mereka, mengingat dalam hal ini *the African Union Peace and Security Council* melakukan komunikasi pada tanggal 24 April 2012, 24 Oktober 2012, 25 Januari 2013, 7 Mei 2013, 29 Juli 2013, 23 September 2013 dan 26 Oktober 2013 dan Pernyataan Pers 6 November, dan pernyataan dari Ketua AU pada 28 Oktober 2013, Menyambut *the African Union Peace and Security Council* (AUPSC) kunjungan 5-6 November untuk Abyei, dan keterlibatan yang terus menerus dalam mencari solusi yang langgeng sehingga masyarakat di Abyei dapat hidup berdampingan secara damai. Kerjasama antara Pemerintah Sudan, Sudan Selatan, dan UNISFA untuk memfasilitasi kunjungan dan mediasi, akan tetapi pada tanggal 5 November terjadinya demonstrasi kekerasan yang berusaha masuk dengan paksa oleh beberapa warga Ngok Dinka di markas UNSIFA, mereka melakukan aksi protes dalam menyambut resolusi damai melalui pertemuan dengan delegasi AUPSC.

Menyambut pentingnya pertemuan rutin yang dilakukan oleh Presiden Bashir dan Presiden Kiir dalam dialog berkelanjutan, mengingat keputusan Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 2046 bahwa pihak harus melanjutkan segera negosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang status akhir Abyei bawah naungan AUHIP. PBB memanggil semua pihak untuk terlibat konstruktif dalam proses dimediasi oleh AUHIP menuju kesepakatan akhir tentang status akhir dari area Abyei, dan menekankan bahwa pihak harus segera melaksanakan tertunda aspek dari perjanjian 20 Juni 2011, khususnya untuk menyelesaikan sengketa Dewan Lokasi Abyei dan segera membentuk Administrasi di area Abyei dan Abyei Police Service. Setelah beberapa terjadinya pertemuan untuk mediasi dalam penentuan hasil akhir status Abyei, tercatat masih adanya penundaan terus membangun lembaga sementara dan menyelesaikan status akhir Abyei kontribusi untuk ketegangan di wilayah tersebut. Menyikapi masalah ini PBB menekankan kepada semua pihak untuk menahan diri dari setiap tindakan sepihak yang akan memperburuk hubungan antar komunal dalam Abyei Area, dan

mengungkapkan keprihatinan atas apa yang AUPSC yang dijelaskan dalam 6 November dalam pernyataan pers mereka sebagai "keputusan oleh Ngok Dinka untuk melakukan referendum unilateral", bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani antara kedua belah pihak, dan meskipun sudah adanya panggilan dan himbauan untuk menahan diri dari masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB , AU Dewan Perdamaian dan Keamanan dan Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan,

Sebagai badan organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa melalui UNISFA melakukan bentuk negosiasi sebagai cara penyelesaian masalah konflik antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Mengekspresikan dukungan penuh untuk upaya Uni Afrika pada situasi antara Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan, untuk meredakan ketegangan saat ini, memfasilitasi dimulainya kembali negosiasi hubungan pasca-pemisahan dan normalisasi hubungan mereka mengingat dalam hal ini Africa Union Perdamaian dan Keamanan Dewan komunikasi melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dimulai dari tanggal 24 April 2012, 24 Oktober 2012, 25 Januari 2013 dan 7 Mei 2013, mengungkapkan tekad bahwa status masa depan Abyei harus diselesaikan dengan negosiasi antara pihak-pihak dengan cara yang konsisten dengan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* dan bukan oleh tindakan sepihak salah satu pihak, dan menyerukan kepada semua pihak untuk terlibat secara konstruktif dalam proses dimediasi oleh *AU High level Implementation Panel (AUHIP)* menuju kesepakatan akhir status Abyei.<sup>13</sup>

Perserikatan Bangsa Bangsa mengharapkan kedua negara tersebut untuk mengambil langkah – langkah untuk menerapkan pembangunan kepercayaan di antara masyarakat di area Abyei, termasuk melalui proses rekonsiliasi untuk menahan diri agar tidak adanya bentrokan antar komunal di Abyei. Hal ini UNISFA meminta untuk melanjutkan dialog AJOC dan

---

<sup>13</sup> United Nation, Security Council. dalam Jurnal *Resolution 2104 (2013) Adopted by the Security Council at its 6970th meeting*, pada tanggal 29 Mei 2013. hal 2

dengan masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka pada strategi yang efektif dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan penuh oleh semua pihak dengan status Abyei yang bebas dari senjata, ini pemerintah Sudan, Sudan Selatan, delagsi AOJC, masyarakat Misseriya dan Ngok Dinka bekerjasama penuh dengan UNISFA.

Upaya Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dengan membuat perjanjian 29 Juni 2011 untuk membuat Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan bekerjasama untuk mendukung UNISFA dalam menjaga keamanan perbatasan dan mekanisme politik bersama, dan diatur dalam ayat 2 untuk menciptakan zona aman perbatatasan tanpa adanya tentara pergerakan (*Safe Demilitarized Border Zone*) dan untuk lebih lanjutnya UNISFA sebagai pihak ketiga meminta bantuan kepada Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk memberikan dukungan eksternal dalam memantau di SDBZ tersebut. Hal ini diharapkan akan menciptakan kerjasama antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk menciptakan keamanan di daerah perbatasan, sehingga sedikit meredakan konflik diantara kedua negara tersebut.

### **3. Memperkuat Kapasitas Kepolisian Abyei dan Infrastruktur Minyak**

Tahap penyelesaian konflik yang ketiga dari teori John Galtung adalah peacebuilding, dimana proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. Dalam mandatnya UNISFA untuk memperkuat kapasitas kepolisian Abyei dengan memberikan dukungan, termasuk dalam pelatihan personil, dan koordinasi dengan kepolisian Abyei pada masalah – masalah hukum dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kualitas kepolisian Abyei sehingga kedepannya bisa

menjaga keamanan warga sipil dari segala ancaman fisik dan kekerasan seksual yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Disamping memperkuat kepolisian Abyei, UNISFA juga mengajarkan bagaimana infrastruktur minyak. Hal ini diharapkan nanti masyarakat atau pemerintah Abyei dapat mengelola minyak untuk memperbaiki dalam sector ekonomi. Dengan kuatnya kualitas kepolisian Abyei, masyarakat Abyei dapat bersama – sama membangun dan menjaga keamana pertambangan minyak yang ada disana sehingga dapat mengangkat wilayah Abyei dari kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak yang harus diselesaikan terlebih penyelesaian perebutan wilayah Abyei itu sendiri oleh Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Hal ini menjadi hambatan besar untuk Abyei membangun sumberdaya minyak yang ada disana dan meningkatkan kualitas wilayahnya.

### **C. Hasil dari upaya UNISFA**

#### **1. Gagalnya perjanjian 20 Juni 2011**

Di akhir tahun 2011, tentara pergerakan Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali berada dalam wilayah Abyei. Hal ini menjadikan gagalnya perjanjian 20 Juni 2011 yang berisikan bahwa wilayah Abyei bebas dari pergerakan tentara pemerintah Sudan maupun Sudan Selatan kecuali UNISFA yang diberikan mandate oleh PBB untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Gagalnya perjanjian 20 Juni 2011 ini menjadi hambatan bagi UNISFA untuk melaksanakan mandatnya karena kegelisaha warga sipil jika terjadinya pemberontakan kembali dari kedua tentara pergerakan negara tersebut.

#### **2. Meningkatnya kualitas kepolisian Abyei**

Dalam salah satu mandate UNISFA yang diberikan oleh PBB merupakan meningkatkan kualitas kepolisian Abyei dengan cara memberikan pelatihan dan berkoordinasi dengan kepolisian Abyei pada masalah hukum dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan agar kepolisian dan masyarakat Abyei saling bekerjasama menjaga keamanan infrastruktur

minyak disana dan kepolisian Abyei dapat menjaga keamanan wilayahnya dalam jangka panjang kedepan sehingga kekerasan seksual dan ancaman fisik tidak terjadi kembali.

3. Masih tertundanya mediasi untuk memutuskan hasil akhir status Abyei

UNISFA sebagai pihak ketiga yang menangani masalah perebutan wilayah Abyei ini, masih mempunyai agenda besar untuk menyelesaikan status akhir Abyei antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Walaupun sudah beberapa kali diadakannya agenda mediasi antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, akan tetapi hal ini masih belum mendapatkan hasil akhirnya. Pada akhir tahun 2014, terjadinya demonstrasi masyarakat Ngok Dinka didepan markas UNISFA karena menolak referendum status Abyei.

4. Refendum unilateral Ngok Dinka

Masalah status akhir Abyei masih menjadi agenda besar, pada tanggal 6 September 2014 press setempat menyatakan terjadinya referendum sepihak dari masyarakat Ngok Dinka. Ngok Dinka yang masyarakatnya masyoritas beragama Kristen memilih untuk bergabung dengan Sudan Selatan, Sedangkan masyarakat Misseriya yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam lebih memilih untuk bergabung dengan Pemerintah Sudan. Referendum sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Ngok Dinka ini menjadi masalah untuk penyelesaian status Abyei. Hingga saat ini asih belum terjadinya kesepakatan pembagian wilayah Abyei antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan.

5. Pembersihan ranjau

Hingga resolusi Dewan Keamanan tahun 2014, masalah ranjau di sekitar wilayah Abyei masih menjadi agenda besar yang belum diselesaikan. Akan tetapi, untuk hasil sampai ditahun 2015, masalah pembersihan ranjau sudah dapat diselesaikan dengan bantuan dari semua negara anggota. Walaupun sudah adanya perkembangan pembersihan ranjau tersebut, UNISFA masih tetap melakukan penjagaan dan pembersihan hingga saat ini.

6. Fasilitas keamanan untuk para pengunjung

Mandat utama dari UNISFA merupakan memberikan keamanan dan memfasilitasi bantuan untuk para pengungsi kembali ke rumahnya dengan aman dari semua ancaman fisik. Hal ini didukung dengan dibentuknya *Safe Demilitarized Border Zone* yang bekerja sama dengan *Joint Border Verification and Monitoring Mechanism* untuk menjaga keamanan termasuk “14 miles area”